

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang tentang Desa.UU Nomor 6 Tahun 2014.

_____, Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah.UU Nomor 23 Tahun 2014.Pasal 1 angka 6 dan 7.

_____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Permendagri No.58 Tahun 2017

_____, Peraturan Kementerian Dalam Negeri tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.Permendagri Nomor 7 Tahun 2008.

_____, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Permendagri No.47 Tahun 2016.

_____, Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa.Nomor 222 Tahun 2020.

_____, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa.Permendagri Nomor.113 Tahun 2014.

_____, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.Permendagri Nomor.37 Tahun 2007.

_____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. PP No 22 Tahun 2015.

_____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. PP. NO. 43 Tahun 2014.

_____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. PP.NO.47 Tahun 2015.

_____, Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.Perbup Nomor.8 Pasal 19 Ayat 2 Tahun 2009.

_____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang standar akuntansi Pemerintah. PP No 24 Tahun 2005.

_____, Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 2.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 ayat (1) tentang Sumber Pendapatan Desa.

_____, Peraturan Kementerian Dalam Negeri tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

_____, Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota, Nomor.72 Pasal 99 Tahun 2005.

_____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. PP Nomor 22 Tahun 2015.

_____, Peraturan Menteri Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Tahun 2018. Permendes Nomor 19 Tahun 2017.

_____, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Pembentukan Kecamatan. Perda Nomor 3 Tahun 2003.

_____, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Desa. Perda Nomor 6 Tahun 2018.

_____, Peraturan Bupati Bogor tentang Pengawasan terhadap Pemerintahan Desa. Perbup Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 5 huruf d.

_____, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (1) dan (2).

_____, Peraturan Bupati Bogor tentang Perencanaan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2022. Perbup Nomor 1 Tahun 2020.

_____, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembangunan Desa. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014.

_____, Peraturan Desa Ciomas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Tahun 2020-2025. Perdes Ciomas Nomor 6 Tahun 2020 pasal 2.

_____, Peraturan Bupati Kabupaten Bogor tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Perbup Kabupaten Bogor No.44 Tahun 2015 Pasal 41.

_____, Peraturan Desa Ciomas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Perdes Ciomas No.6 Tahun 2022.

_____, Peraturan Bupati Bogor tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Perbup Nomor 14 Tahun 2019.

B. Buku

Chabib, Soleh, & Heru. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media.

Dwipayana. (2003). *Membangun Good Governance Di Desa*. Yogyakarta: IREPress.

Hadjon, & M Philipus. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Huda, N. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.

Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Sarman. (2015). *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Remila Cipta.

Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, & Catur Widoharuni. (2016). *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press.

Solekhan, M. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bebas Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.

Sunarno, S. (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

HAW. Widjaja. (2014). *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Abdul latif. (2007). *Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Yogyakarta: Total Media.
- Hans.Kalsen. (2009). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusamedia.
- Sujamto.(1986). *tentang Pengawasan*. Yogyakarta.
- Ni'matul Huda. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang, Jatim: Setara Press.
- Yansen. (2014). *Revolusi dari Desa (Saatnya Dalam Pembangunan Percaya Sepenihnya Kepada Rakyat)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sumaryadi, I Nyoman. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Suharto. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Adimata.
- Sutarno.NS. (2004). *Manajemen Perpustakaan*. Jakarta: Semitra Media Utama.

C. Lain-Lain

- Admin. (2007). Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. *Peraturan Pedia ID*, 11.
- Apriany, R. (2018). Analisis Yuridis Mekanisme Keuangan Desa. *UII Yogyakarta*, 4-5.
- JDIH BPK RI. (2008, Februari 8). *Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Retrieved from peraturan.bpk.go.id:
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126339/permendagri-no-7-tahun-2008>
- Ngentine, N. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBDES) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 1-7.
- Riyani, N. (2016). Analisis Pengelolaan Dana Desa. *eprints.ums*, 4-5.
- Bambang, P. (2020). Pengertian Desa, Otonomi, dan Wewenang. Pustaka Borneo, Kalimantan. <https://www.pustakaborneo.org/berita/seputar-pembangunan-berkelanjutan/pengertian-desa-otonomi-dan-wewenang.html#gsc.tab=0>
- Nyimas Latifah,L.A. (2016, Desember 2). *Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa*. Jurnal Penelitian Politik Volume 13, 194.

- Marbun. (2012). Hukum Administrasi Negara. *FH UII Press*, 2.
- Sakinah Nadir. (2013). Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa (Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa). *Politik Profetik*, 12.
- Taufeni, T. (2009). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. *Universitas Riau*, 4-10.
- Ngentine, N. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBDES) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 1-7.
- JDIH BPK RI. (2018, Februari 8). *Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Retrieved from peraturan.bpk.go.id:
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126339/permendagri-no-7-tahun-2008>
- Apriany, R. (2018). Analisis Yuridis Mekanisme Keuangan Desa. *UII Yogyakarta*, 4-5.
- Admin. (2007). Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. *Peraturan Pedia ID*, 11.
- Dokumen Desa Ciomas. <https://kecamatanciomas.bogorkab.go.id/desa/45>
- Fahri.Lutfhi.N. (2017). *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektifitas Program Pembangunan Desa*. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 75-88
- Sutardi, Hardi Warsono.Retno Sunu Astuti. *Implementasi Kebijakan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Inspektorat*. Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang Jawa Tengah, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398. Vol. 5, No. 11, November 2020.
- Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bogor (2020-2021). *Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Desa pada Desa Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor*.
- Wawancara dengan Sekretaris Desa Ciomas, Wayan Swastika, Selasa 28 Maret 2023, Pukul 10.00 Wib, di Kantor Desa Ciomas.
- Wawancara dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Ciomas, Mulyadi, Selasa 28 Maret 2023, pukul 01.20 Wib, di Kantor Desa Ciomas
- Wawancara dengan Bendahara Desa Ciomas, Heni, Selasa 28 Maret 2023, pukul 11.30 Wib, di Kantor Desa Ciomas.
- Wawancara dengan ketua BPD desa Ciomas, Ishak, Selasa 28 Maret 2023, Pukul 02.20 Wib di kantor Desa Ciomas.